

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan merupakan setiap ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja (Elder dkk, 2011: 372). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners/ACFE* (2012), menemukan bahwa penyalahgunaan aset merupakan jenis kecurangan yang paling sering terjadi yaitu sekitar 87% dengan tingkat kerugian mencapai \$120.000. Sementara itu presentase korupsi yaitu sekitar 33% dengan kerugian \$250.000. Kecurangan pada laporan keuangan hanya sekitar 8%, dengan tingkat kerugian sekitar \$1 juta. Akan tetapi untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, kasus kecurangan yang paling banyak terjadi adalah korupsi dan penyalahgunaan aset.

Korupsi di Indonesia sepertinya sudah menjalar dan berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Parahnya hampir setiap pejabat-pejabat tinggi Negara melakukannya, tanpa mereka pikirkan kerugian yang diderita oleh Negara itu sendiri (Nurhadi, 2013). Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang merugikan Negara seperti Bailot Bank Century, spesialis pajak Gayus Tambunan, kasus korupsi penggelapan dana pembangunan wisma atlet yang dilakukan oleh Nazarudin dkk, serta masih banyak lagi kasus-kasus lain baik yang telah terungkap maupun yang masih dalam proses penyidikan (Fitriyani, 2012).

Untuk kasus di Indonesia, sebenarnya tantangan terberat bagi auditor saat ini adalah pemberantasan korupsi, karena di Indonesia sendiri korupsi sudah menjadi penyakit turun menurun. Selain itu, tindak pidana korupsi bahkan tidak hanya menjalar ke wilayah birokrasi pemerintahan, tetapi juga ke dalam sistem peradilan (Syamsuddin, 2011:175). Menurut *Transparency International* (2013), melaporkan bahwa *Corruption Perception Index* (CPI) untuk Indonesia menempati urutan ke 117 dari 175 Negara dengan skor 32. Hal ini berarti tingkat korupsi di Indonesia masih sangat memprihatinkan.

Berdasarkan laporan dugaan korupsi tertinggi kepada KPK dari tahun 2004 hingga tahun 2012, provinsi Jawa timur menempati urutan nomor dua tertinggi. Hingga akhir tahun 2012, sebanyak 5.655 laporan dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dilaporkan ke KPK (ICW, 2013). Selain itu, pernyataan dari ketua KPK menyebut bahwa pelaku korupsi di Jawa Timur merupakan koruptor kelas wahid (Kompas.com, 2013), sehingga sulit untuk mendeteksi bukti-bukti indikasi korupsi. Inilah alasan mengapa peneliti melakukan penelitian di BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Memang benar perkembangan pemberantasan korupsi saat ini semakin menunjukan titik terang. Disamping telah terbentuknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah juga membentuk pula suatu instansi khusus untuk memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Fitriyani, 2012). Namun, kenyataan menunjukan bahwa korupsi sulit sekali untuk diberantas, apalagi dalam waktu yang singkat (Soepardi, 2010).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh ACFE (2012), tingkat pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh auditor eksternal hanya sekitar 3%, jauh

dibawah *tip* dan auditor internal. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kegagalan auditor eksternal masih sangat besar. Padahal praktek korupsi yang dilakukan oleh para pejabat Indonesia sudah mencapai kondisi yang sangat mengkhawatirkan (Widayanti dan Subekti, 2001). Selain itu, besarnya kerugian yang semakin meningkat yang diakibatkan oleh suatu kecurangan, juga telah merusak reputasi dan kredibilitas profesi auditor (Chui dan pike, 2013).

Adanya fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya pemeriksa eksternal pemerintah, harus melakukan tindakan proaktif dalam merespon tantangan tersebut (Widayanti dan Subekti, 2001). Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (UU no 15 tahun 2006, pasal 6 ayat 3). Untuk itu dibutuhkan auditor-auditor profesional yang mampu mendeteksi kecurangan dan kemana saja hasil kecurangan tersebut disembunyikan (Widayanti dan Subekti, 2001).

Semakin berkembangnya dunia bisnis, membuat organisasi menjadi semakin kompleks sesuai dengan kemajuan usaha yang dijalankannya (Prasita dan Adi, 2007). Selain itu, kemajuan teknologi yang tidak terbendung lagi juga membuat organisasi semakin bebas dalam melakukan transaksi tanpa harus memperhatikan faktor geografis. Namun demikian, semakin tinggi tingkat suatu kompleksitas akan menimbulkan suatu kerumitan dalam pengauditan, karena kecenderungan bahwa tugas melakukan audit adalah tugas yang banyak menghadapi persolan kompleks (Nadhiroh, 2010). Situasi semacam ini merupakan hambatan atau tantangan bagi seorang auditor, terlebih pada saat seperti ini auditor mempunyai peranan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih (Prasita dan Adi, 2007).

Dalam pengumpulan bukti audit, auditor harus diberikan ruang lingkup yang cukup untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian opini (Suhartini dan Ariyanto, 2009). Semakin luas lingkup audit yang diberikan maka akan semakin banyak hal yang terungkap, sehingga risiko auditor gagal dalam mendeteksi adanya indikasi kecurangan akan semakin kecil. Selain itu, auditor dapat menolak untuk memberikan pendapat apabila terdapat pembatasan lingkup audit (Prastio, 2012). Hal ini dikarenakan auditor harus mengumpulkan bukti yang kompeten, sehingga apabila terdapat pembatasan lingkup audit, maka bukan tidak mungkin auditor akan gagal dalam mendeteksi indikasi kecurangan.

Sebelum auditor melaksanakan prosedur dan program audit, auditor harus terlebih dahulu memahami dan menilai risiko bisnis klien. Sehingga nantinya auditor dapat menyusun metode dan strategi audit yang sesuai dengan tingkat risiko tersebut. Menurut Koroy (2008), penilaian risiko yang kurang sensitif akan berdampak serius terhadap tugas pendeteksian kecurangan. Selain itu penelitian Allen *et al* (2009) menegaskan bahwa salah satu alasan kegagalan auditor dalam mendeteksi suatu kecurangan ialah gagalnya auditor dalam menilai dan mengidentifikasi risiko salah saji kecurangan yang material. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penilaian risiko merupakan hal yang sangat penting guna membantu auditor dalam mendeteksi suatu kecurangan.

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain kompleksitas audit, lingkup audit, dan penilaian risiko. Dalam penelitian terdahulu mungkin banyak peneliti yang menggunakan variabel ini, seperti Akbar (2012), Iskandar dan Sanusi (2011), Prasita dan Adi (2007), Prastio (2012), dan sebagainya dengan mengaitkannya terhadap kualitas audit, *audit judgment*, kepuasan kerja, opini auditor, dan yang lainnya. Akan tetapi perbedaan

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada sisi peneliti yang akan mengaitkannya dengan pendeteksian indikasi korupsi, dimana penelitian yang berkaitan dengan peran auditor eksternal dalam memberantas korupsi masih sangat terbatas dan jarang ditemukan.

Sebelum melakukan pekerjaan audit, seorang atasan akan merencanakan tugas bersama bawahannya terkait dengan tugas serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dimana pemberian tugas, ditentukan oleh persepsi atasan terkait dengan kompleksitas suatu tugas dan pengalaman bawahannya. Atasan akan memberikan tugas yang kompleksitasnya tinggi kepada bawahan yang sudah berpengalaman, begitupun sebaliknya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bawahan akan diberikan tugas yang tidak sesuai dengan pengalamannya. Sehingga dalam penugasan, seorang bawahan kemungkinan akan mendapatkan tugas yang sulit, simpel, atau paling mudah.

Dengan bervariasinya tingkat kompleksitas audit yang diterima, tidak dapat dihindari auditor akan mengalami kebingungan dan berperilaku disfungsi dalam melakukan audit (Iskandar dan Sanusi, 2011), karena tidak sesuai dengan kemampuannya. Sehingga secara tidak langsung hal ini akan mengakibatkan penurunan kualitas kinerja auditor. Ketika seorang auditor mengalami kebingungan, auditor tidak akan dapat mengambil suatu keputusan secara maksimal, serta perilaku dari seorang auditor akan menjadi tidak menentu. Jika auditor sudah berperilaku tidak menentu, bagaimana dia bisa mendeteksi suatu kecurangan, padahal tugas dalam mendeteksi suatu kecurangan memerlukan konsentrasi dan fokus yang tinggi.

Dalam melakukan pekerjaannya, seorang auditor sering dihadapkan pada masalah pembatasan ruang lingkup audit, baik lingkup audit yang disebabkan

oleh *klien* ataupun keadaan. Pembatasan lingkup audit dapat dengan sengaja diciptakan oleh *auditee*. Pada dasarnya setiap kecurangan akan ditutup-tutupi oleh manajemen (Akbar, 2012). Manajemen akan berusaha menutupi akses data dan informasi kepada auditor yang dirasa membahayakan. Sehingga auditor tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk pengambilan suatu keputusan, dan dikarenakan kurangnya bukti yang kompeten pula kegagalan dalam mendeteksi kecurangan akan semakin besar.

Banyaknya kasus kecurangan korupsi di Indonesia membuat masyarakat bertanya-tanya tentang kredibilitas seorang auditor. Auditor merupakan seorang independen yang diharapkan untuk memberikan suatu pendapat yang sesuai dengan kondisinya. Suatu opini seharusnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Akan tetapi banyaknya pendapat wajar tanpa pengecualian, berbanding terbalik dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Ketika seorang auditor memberikan pendapat wajar, seharusnya hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah dan instansi itu bersih dari kecurangan.

Penilaian risiko merupakan bagian dari manajemen risiko untuk menganalisa informasi yang tersedia guna mengetahui dampak dan pengaruh yang akan timbul. Ketika suatu prosedur audit telah dijalankan secara mestinya, dan auditor masih belum bisa mendeteksi kecurangan, maka perlu dipertanyakan bagaimana penilaian risikonya. Hal ini dikarenakan penilaian risiko merupakan suatu hal yang penting guna mengetahui dimana saja titik-titik yang berpotensi rawan terjadi kecurangan.

Berdasarkan kasus-kasus dan penelitian diatas, yang menyatakan bahwa tingkat keberhasilan auditor eksternal dalam mendeteksi suatu kecurangan jauh lebih rendah dibandingkan dengan *tip* dan auditor internal, maka peneliti tertarik

untuk meneliti apa kiranya yang menyebabkan auditor eksternal gagal dalam mendeteksi indikasi kecurangan korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompleksitas audit berpengaruh terhadap kegagalan auditor eksternal dalam mendeteksi indikasi kecurangan?
2. Apakah lingkup audit berpengaruh terhadap kegagalan auditor eksternal dalam mendeteksi indikasi kecurangan?
3. Apakah penilaian risiko berpengaruh terhadap kegagalan auditor eksternal dalam mendeteksi indikasi kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompleksitas audit terhadap kegagalan auditor eksternal dalam mendeteksi indikasi kecurangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkup audit terhadap kegagalan auditor eksternal dalam mendeteksi indikasi kecurangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penilaian risiko terhadap kegagalan auditor eksternal dalam mendeteksi indikasi kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, diharapkan baik secara langsung ataupun tidak, dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah acuan, baik itu sebuah referensi untuk menambah ilmu ataupun untuk mengembangkan dalam penelitian selanjutnya guna menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat.

2. Bagi praktiknya

Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebuah pertimbangan bagi auditor dalam hal melaksanakan pekerjaannya, sehingga nantinya auditor tidak akan mengalami kegagalan dalam mendeteksi indikasi kecurangan, khususnya dalam mendeteksi indikasi korupsi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan sebagai pemicu agar auditor dapat meningkatkan kinerja serta kualitas audit yang lebih baik.